

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia**

Menurut laporan (UNDP, 1990) memperkenalkan indikator pembangunan manusia, yang didalamnya mengukur berbagai aspek kualitas hidup seperti tingkat pendidikan, kesehatan, daya beli, dan aspek lainnya. Nantinya dari hasil pengukuran tingkat kualitas hidup itulah diperoleh angka yang mampu merepresentasikan perkembangan pembangunan manusia secara terukur yang diberi nama Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka Indeks Pembangunan Manusia berkisar antara 0 sampai 100. Semakin mendekati angka 100, maka mengindikasikan pembangunan manusia yang semakin baik (Adrogué & Crespo, 2010)

Dalam pengukuran IPM pada dasarnya terdapat tiga komponen utama yang diukur yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli. Ketiga komponen tersebut mempunyai indikator masing-masing yang digunakan dalam perhitungan IPM. Komponen pendidikan menggunakan rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, awalnya untuk mengukur komponen pendidikan digunakan angka melek huruf namun sekarang dirasa tidak relevan untuk dijadikan sebagai indikator pendidikan. karena angka melek huruf hampir sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membandingkan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Selanjutnya untuk mengukur

komponen kesehatan digunakan angka harapan hidup. Sementara untuk mengukur komponen daya beli digunakan indeks pendapatan.

#### 1. Pendidikan

- Rata-Rata Lama Sekolah

Menurut (BPS, 2021) mendefinisikan rata-rata lama sekolah sebagai jumlah tahun yang dihabiskan untuk menjalani pendidikan formal. Cakupan usia yang dihitung dalam rata-rata lama sekolah adalah penduduk yang berusia 25 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah mampu menggambarkan semakin tinggi pendidikan yang dicapai oleh masyarakat, maka pembangunan manusia pun semakin baik. Dalam melakukan perhitungan Rata-Rata Lama Sekolah dibutuhkan beberapa informasi secara rinci mengenai rekam jejak seperti lama sekolah, jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki

- Harapan Lama Sekolah

Menurut (BPS, 2020) menyatakan harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah (tahun) yang diharapkan akan dikenyam oleh anak pada kategori umur tertentu kelak nanti. Harapan lama sekolah diperoleh dari perkiraan kemungkinan anak akan tetap bersekolah pada umur selanjutnya. Harapan lama sekolah dihitung dari penduduk yang berusia tujuh tahun ke atas. Harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui keadaan pembangunan sistem pendidikan berbagai jenjang

yang dicerminkan oleh lamanya pendidikan yang diharapkan dicapai oleh setiap anak.

## 2. Kesehatan

- Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah rata-rata jumlah tahun hidup yang diduga akan dijalani oleh seseorang. Faktor yang mempengaruhi produktivitas sumber daya manusia terletak pada kesehatannya sendiri hal ini mencakup kumpulan dari gaya hidup yang diterapkan oleh individu seperti faktor gizi, lingkungan yang baik, aktivitas fisik atau olahraga. Rendahnya kualitas hidup yang diterapkan seseorang tentunya selain akan berpengaruh terhadap kesehatan juga berpengaruh terhadap daya kognitif dan mental seseorang, hal ini akan menyebabkan tingkat output yang dihasilkan sumber daya manusia menjadi rendah.

## 6. Daya Beli

- Pengeluaran per kapita

Dalam pandangan pembangunan pendapatan adalah alat untuk menggenggam sumber daya supaya mempunyai hidup yang layak. Semakin besar pendapatan maka semakin besar kemampuan untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa untuk menopang kehidupan yang layak. sumber daya yang diperoleh dari pendapatan itulah yang dijadikan sebagai sarana pendukung menjalani kehidupan di berbagai aspek mulai dari pendidikan, kesehatan, keterampilan, pergaulan dan lainnya. Karena konsep inilah mengapa pendapatan dijadikan sebagai

salah satu indikator yang dimasukkan dalam menghitung IPM. Menurut (BPS, 2019) indikator yang digunakan untuk melihat komponen pendapatan yaitu pengeluaran per kapita (*purchasing power parity*) secara konsep PPP diukur menggunakan pengeluaran riil per kapita konsumsi setahun. PPP menggambarkan aspek peluang kerja / berusaha sampai memperoleh sejumlah uang sehingga nantinya mempunyai kemampuan daya beli (*purchasing power*).

### **2.1.1.1 Teori Indeks Pembangunan Manusia**

Berlandaskan dari teori *Human Development Theory* yang dicetuskan oleh (UNDP, 1990) untuk memperbaiki paradigma sumber daya manusia yang sebelumnya menekan pada produk domestik bruto atau rata-rata pendapatan perkapita. Menurut (UNDP, 1990) bahwa pendapatan per kapita belum mampu secara detil menggambarkan kondisi sumber daya manusia (kesejahteraan) suatu wilayah. Hal ini karena kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin cenderung tinggi.

*Human Development Theory* diperkenalkan oleh (UNDP, 1990) berpegang pada konsep *enlarging people's choices* atau proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Dalam arti konsep tersebut tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi yang diukur oleh kemampuan daya beli masyarakat, tetapi aspek lain juga seperti pendidikan dan kesehatan yang dimana menjadi komponen atau aspek utama dari teori ini. Walaupun masih terdapat banyak aspek atau komponen yang terdapat dalam *Human Development Theory* seperti

komponen stabilitas politik, keamanan negara, toleransi agama, indeks kebahagiaan dan lainnya. Namun apabila ketiga komponen utama pendidikan, kesehatan dan daya beli sudah mampu dijelaskan khususnya dalam perhitungan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maka komponen lainnya sudah dianggap terwakili oleh ketiga komponen utama tersebut.

Tujuan konsep *Human Development Theory* dalam mencapai tujuan akhir memperhatikan empat hal utama, yaitu sebagai berikut :

1. Produktifitas

Produktifitas penduduk berkaitan dengan human capital yang dimiliki dan investasi manusia dilakukan untuk meningkatnya.

2. Pemerataan

Penduduk memiliki hak untuk mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus.

3. Kestinambungan

Pembangunan yang dilakukan tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan saat ini tapi juga masa depan.

#### 4. Pemberdayaan

Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan kehidupan mereka.

##### 2.1.1.2 Cara Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia

Setiap komponen IPM ditetapkan dengan nilai minimum dan maksimum sebelum dilakukan perhitungan IPM dengan rumus sebagai berikut:

Dimensi Kesehatan

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

Dimensi Pendidikan

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Dimensi Pengeluaran

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

Menghitung Indeks Pembangunan Manusia

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

### 2.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Menurut (Rahmat, 2020) laju pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan keadaan ekonomi suatu negara secara berkelanjutan menuju arah yang lebih baik dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi sering dijadikan sebagai landasan untuk mengetahui perekonomian suatu negara, khususnya oleh negara berkembang. Angka pertumbuhan ekonomi biasanya dijabarkan dalam bentuk persentase yang artinya bisa bertanda positif dan negatif. Jika angka pertumbuhan negatif bisa disebabkan oleh penurunan yang lebih besar dari pendapatan nasional. Secara sederhana pertumbuhan ekonomi meningkat jika terjadi peningkatan kuantitas barang dan jasa.

#### 2.1.2.2 Teori Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi memang penting agar kesejahteraan rakyat, namun pertumbuhan bukan tujuan akhir dari pembangunan, yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi digunakan untuk memperbaiki kapabilitas manusianya dan sisi lainnya bagaimana rakyat menggunakan kapabilitasnya (Pieter Fretes, 2017).

PDRB per kapita di suatu daerah menggambarkan rata-rata ke mampuan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya terutama kebutuhan-kebutuhan pokok. Pemenuhan

kebutuhan pokok masyarakat merupakan salah satu indikator kesejahteraan yang berasal dari aspek pemerataan pendapatan masyarakat di daerah yang dimana merupakan salah satu komponen IPM tepatnya pada aspek daya beli masyarakat. (Ekana Nainggolan, 2021).

### **2.1.2.3 Cara Perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produk barang dan jasa mengalami peningkatan. Untuk mengukur berapa pertumbuhan ekonomi secara angka artimatika. Pada umumnya perhitungan pertumbuhan ekonomi dihitung dari PDB (nasional) atau PDRB (regional) dengan menggunakan rumus:

$$PE = \frac{(PDRB_t - PDRB_{t-1})}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

LPE = Laju Pertumbuhan Ekonomi

PDRB<sub>t</sub> = PDRB tahun tertentu

PDRB<sub>t-1</sub> = PDRB tahun sebelumnya

### **2.1.3 Anggaran Pendidikan**

Anggaran pendidikan merupakan salah satu anggaran yang dialokasikan pada fungsi pendidikan yang dirancang atau dianggarkan oleh kementerian atau lembaga. Dalam hal hak penerimaan anggaran pendidikan sendiri bukan hanya saja kementerian pendidikan, namun kementerian lain juga yang menjalankan fungsi pendidikan dalam programnya (MKRI, 2018).



Menurut (Royda & Frecilia Nanda Melvan, 2018) anggaran pendidikan merupakan belanja yang dilakukan oleh pemerintah pada sektor pendidikan bentuknya bisa berupa pembangunan sekolah-sekolah, fasilitas pendidikan, beasiswa di bidang pendidikan, dan lain-lain. (Asaju, 2012) berpendapat bahwa investasi pada pembangunan sumber daya manusia melalui bidang pendidikan adalah rencana yang sangat tepat untuk menghadapi tantangan di masa depan.

Urgensi anggaran pendidikan serta kewajiban pemerintah untuk menjamin pengembangan pendidikan melalui anggaran tercermin pada UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, pemerintah mewajibkan setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan wajib membiayainya serta pemerintah minimal mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD (MKRI, 2018).

Secara spesifik pengalokasian anggaran pendidikan tertuang pada pasal 49 UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 yaitu dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (BPK, 2010). Hal ini juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (BPK, 2008).

Struktur anggaran pendidikan dalam APBN termasuk kedalam alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan

alokasi anggaran pendidikan melalui belanja pembiayaan, termasuk gaji guru akan tetapi tidak masuk dalam anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggara pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Menurut (DPR.go.id, 2013) Anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan yaitu anggaran pendidikan yang berasal dari komponen pembiayaan APBN berupa dana pengembangan pendidikan nasional. Dana pengembangan pendidikan nasional terdiri dari dana abadi pendidikan dan dana cadangan pendidikan. Tujuannya :

1. Menjamin keberlangsungan pendidikan bagi generasi selanjutnya yang merupakan bentuk pelaksanaan dari (*intergenerational equity*).
2. Dana cadangan digunakan untuk mengantisipasi jika fasilitas pendidikan memerlukan rehabilitasi akibat rusak bencana alam yang dilakukan oleh badan layanan umum (BLU) pengelola dana bidang pendidikan.

#### **2.1.4 Anggaran Kesehatan**

Anggaran kesehatan yaitu anggaran yang dialokasikan pada fungsi kesehatan yang rancang atau dianggarkan oleh kementerian atau lembaga. Peran pemerintah untuk menyediakan anggaran bagi kesehatan di Indonesia sudah disinggung dalam UUD 1945 disebutkan kesehatan merupakan hak dasar manusia, sehingga pemerintah harus bertanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan perlindungan dan fasilitas kesehatan terhadap rakyatnya. Ditambah

lagi dalam tujuan pembangunan nasional dikatakan setiap penduduk berhak memperoleh tingkat kesehatan setinggi-tingginya. Wajar jika kesehatan disebut sebagai investasi pemerintah pada belanja pembangunan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Menurut (Royda & Frecilia Nanda Melvan, 2018) anggaran kesehatan merupakan besarnya pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan yang diarahkan pada pembangunan fasilitas kesehatan, jaminan kesehatan masyarakat dan lain-lain.

Bidang kesehatan sama halnya dengan pendidikan mendapatkan alokasi dalam APBN. Sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2004 (BPK, 2004). Mengamantkan setiap kementerian harus menyusun Rencana Strategis (Rensra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Maka pembangunan kesehatan Indonesia program yang berfokus pada meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan jaminan kesehatan dengan 6 sasaran pokok sebagai berikut:

1. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu dan anak.
2. Meningkatkan pengendalian penyakit.
3. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan.
4. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan.
5. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin.

6. Meningkatnya responsivitas sistem kesehatan.

#### **2.1.4.1 Teori Anggaran pemerintah**

Pengeluaran pemerintah yang diproksi sebagai belanja modal ditujukan dan diprioritaskan bagi penyediaan kebutuhan dasar dan pelayanan publik utamanya penyediaan sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi dan infrastruktur sehingga diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sinulingga, 2015). Arti dari belanja modal itu sendiri adalah pengeluaran rutin yang dilakukan oleh pemerintah dalam membangun infrastruktur terutama untuk membangun atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), maka ketika belanja modal meningkat maka indeks pembangunan manusia juga akan meningkat (Nur Baeti, 2013).

Menurut (Rizaldi Zakaria, 2016) mengemukakan bahwa peningkatan jumlah alokasi pembiayaan pembangunan yang difokuskan pada elemen pembangunan manusia, terutama pada penyediaan sektor kesehatan diharapkan dapat berdampak terhadap taraf capaian harapan hidup yang lebih lama sehingga dapat menekan dan mengurangi tingkat kematian.

#### **2.1.5 Penelitian Terdahulu**

Sebagai acuan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa kajian pustaka sebagai andasan berpikir, berikut hasil penelitian yang berkaitan dengan IPM dan faktor penentunya sebagai bukti empiris bagi perekonomian Indonesia.

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

NO	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengaruh Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau (Dewi et al., 2016)	Pertumbuhan Ekonomi IPM	Kemiskinan Covid-19 Anggaran Pendidikan Anggaran Kesehatan	Hasil penelitian menunjukkan kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap IPM	Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau Vol 4, No 1 (2017), ISSN : 2355-6854
2	Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan Dan Pdrb Terhadap Ipm Di Provinsi Aceh (Muliza et al., 2017)	Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan IPM	Pertumbuhan Ekonomi Kemiskinan Covid-19	Hasil penelitian menunjukkan Tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM	<a href="http://eki.feb.unsyiah.ac.id/">http://eki.feb.unsyiah.ac.id/</a> Volume 3 Nomor 1, Maret 2017 ISSN. 2502-6976
3	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia (Mongan, 2019)	Pengeluaran Pendidikan Pengeluaran Kesehatan IPM	Pertumbuhan Ekonomi Covid-19	Hasil penelitian menunjukkan Pengeluaran pemerintah pusat kesehatan dan pengeluaran pemerintah daerah pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, pengeluaran pemerintah daerah kesehatan negatif dan signifikan.	<a href="https://itrev.kemenkeu.go.id/">https://itrev.kemenkeu.go.id/</a> Vol.4, No.2, (2019), Hal.163-176, ISSN NO. 2527-2721
4	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan Dan Teknologi Terhadap IPM Provinsi Di Indonesia 2007-2011 (Ridwan Maulana & Prasetyo Ari Bowo, 2013)	Pertumbuhan Ekonomi IPM	Pendidikan Teknologi Anggaran Pendidikan Anggaran Kesehatan Covid-19	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendidikan berpengaruh	<a href="https://journal.unnes.ac.id/">https://journal.unnes.ac.id/</a> Vol.6, No(2) (2013): 103-213, ISSN 1979-715X

				signifikan terhadap IPM.	
5	Pengaruh Pengeluaran Kesehatan Dan Pendidikan Serta Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Maluku (Abdul Kadir Mahulauw et al., 2017)	Pertumbuhan Ekonomi Pengeluaran Pendidikan Pengeluaran kesehatan IPM	Infrastuktur Covid-19	Hasil analisis secara simultan ketiga jenis pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap IPM.	<a href="https://ejournal.umm.ac.id">https://ejournal.umm.ac.id</a> Vol .14, No.02, 2016, ISSN : 2527-4023
6	Pengaruh Gini Ratio, Pengeluaran Non Makanan Per Kapita Pendapatan Asli Daerah Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Pada IPM Kab/Kota Di Provinsi Bali Periode 2004-2012 (Rustariyuni, 2014)	Pertumbuhan Ekonomi IPM	Gini Ratio Pengeluaran Non Makanan Per Kapita Pendapatan Asli Daerah Anggaran Pendidikan Anggaran Kesehatan Covid-19	Gini rasio berpengaruh positif signifikan, pengeluaran non makanan per kapita positif signifikan, pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan, pertumbuhan ekonomi	<a href="https://ojs.unud.ac.id/">https://ojs.unud.ac.id/</a> Vol. X No. 1 : 45 – 55, ISSN : 1907-3275
7	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kota Provinsi Bali Periode 2005 – 2013 (Adelfina & Jember, 2016)	Pertumbuhan ekonomi IPM	Kemiskinan Belanja daerah Anggaran Pendidikan Anggaran Kesehatan Covid-19	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan, kemiskinan berpengaruh negatif signifikan, belanja daerah berpengaruh positif signifikan dan secara simultan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap IPM	<a href="https://ojs.unud.ac.id/">https://ojs.unud.ac.id/</a> Vol No.5 [10] : 1011-1025, ISSN: 2303-0178
8	Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks	Pertumbuhan Ekonomi IPM	Kemiskinan Anggaran Pendidikan	Secara simultan tingkat kemiskinan dan pertumbuhan	<a href="https://Telkomuniversity.ac.id/">https://Telkomuniversity.ac.id/</a> Vol. 15. No.2, September 2018:177-

	Pembangunan Manusia Indonesia (Syofya, 2018)		Anggaran Kesehatan Covid-19	ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.	185, ISSN : 1829 9822
9	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kemiskinan Terhadap Ipm Kabupaten Simalungun (Sanniana Sidabutar et al., 2020)	Pengeluaran pemerintah pendidikan IPM	Kemiskinan Pertumbuhan Ekonomi Anggaran Kesehatan Covid-19	Hasil analisis dari penelitian ini variabel yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM adalah APBD untuk pendidikan dan kemiskinan.	<a href="http://journal.unilak.ac.id/">http://journal.unilak.ac.id/</a> Vol. 2 No. 2 Nov 2020, ISSN: 2614-7181
10	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Studi Pada Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat Periode 2010-2014 (Zuraida Rakhmawati et al., 2017)	Pertumbuhan ekonomi IPM	Pendapatan Asli daerah Belanja Daerah Anggaran Pendidikan Anggaran Kesehatan Covid-19	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan	<a href="http://journal.unnes.ac.id/">http://journal.unnes.ac.id/</a> Vol.4, No.2 Agustus 2017   Page 1709, ISSN : 2355-9357
11	Public Education Expenditure and Its Impact on Human Resource Development in India: An Empirical Analysis (Patel & Annapoorna, 2019)	Public Education Expenditure Human Development Index	Education Index Economic Growth Public Health Expenditure Covid-19	Since, public education expenditure cause HDI, it can be expected that public education expenditure cause the level of educational attainment expressed as education index, which is a component of HDI calculated by using mean and expected years of schooling in India.	<a href="http://journals.sagepub.com/">http://journals.sagepub.com/</a> Vol.6, Issue 1, June 2019, Pages 97-109, ISSN : 2322-0937
12	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan	Pengeluaran pendidikan	Pertumbuhan Ekonomi Covid-19	Hasil analisis ini menunjukkan bahwa sektor	<a href="http://journal.feb.unmul.ac.id/">http://journal.feb.unmul.ac.id/</a>

	Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kutai Timur (Merang Kahang et al., 2016)	Pengeluaran kesehatan IPM		pengeluaran pemerintah pendidikan secara signifikan mempengaruhi IPM Kabupaten Kutai Timur.	Volume 18, (2), 2016, ISSN print: 1411-1713
13	Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau (Chalid & Yusuf, 2014)	Laju Pertumbuhan Ekonomi IPM	Kemiskinan Pengangguran Upah Minimum Anggaran Pendidikan Anggaran Kesehatan Covid-19	Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia Upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM)	<a href="https://je.ejournal.unr.i.ac.id">https://je.ejournal.unr.i.ac.id</a> Volume 22, Nomor 2 Juni 2014, ISSN : 0853-7593
14	Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap IPM Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009 (Mirza, 2011)	Pertumbuhan ekonomi IPM	Kemiskinan Belanja modal Anggaran Pendidikan Anggaran Kesehatan Covid-19	Hasil menunjukan kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM dan Belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap IPM	<a href="http://journal.unnes.ac.id/">http://journal.unnes.ac.id/</a> Vol.1, No.2 (2012), ISSN : 2252-6560



15	Analisis Pengaruh Distribusi Pendapatan, Tingkat Pengangguran, Dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Ipm Di Indonesia (Meydiasari & Soejoto, 2017)	Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan IPM	Distribusi pendapatan Tingkat pengangguran Anggaran Kesehatan Covid-19	Sedangkan variabel tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Adapun secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap IPM.	<a href="https://journal.unesa.ac.id">https://journal.unesa.ac.id</a> Vol. 01 No. 02 November 2017, e-ISSN 2579-5716
----	--	--	--	---	--

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran ini memuat penjelasan hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Maka dari itu, penulis telah membuat kerangka pemikiran sebagai berikut :

### 2.2.1 Hubungan Laju Pertumbuhan Ekonomi Dengan Indeks Pembangunan Manusia

Sumber daya manusia sangat berperan penting dalam pembangunan ekonomi. Dengan sumber daya manusia yang memiliki kualitas performa ekonomi juga akan menjadi lebih baik. Menurut (Todaro & Smith, 2012) sumber daya suatu negara merupakan faktor penentu karakter dan kecepatan pembangunan sosial dan ekonomi dari negara tersebut.

Sementara (Lugastoro, 2013) menambahkan pertumbuhan ekonomi dengan IPM bersifat timbal balik yang diperkuat oleh upaya pemerintah. Ketika hubungan pertumbuhan ekonomi dan IPM kuat, keduanya akan mendukung satu sama lain. Namun jika ketika kedua hubungan tersebut lemah maka akan merugikan satu sama lain. Hal ini sesuai dengan penelitian (Retnasari, 2015) mengatakan jika pertumbuhan ekonomi naik maka IPM pun akan naik

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi terhadap IPM bersifat positif artinya jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka IPM pun meningkat, jika dijelaskan secara sederhana pertumbuhan ekonomi negara meningkat maka akan meningkatkan pertumbuhan output perkapita keadaan ini akan mengubah pola konsumsi masyarakat, alhasil kemampuan daya beli juga akan meningkat yang diukur menggunakan pengeluaran per kapita. Kondisi seperti ini akan meningkatkan perolehan nilai IPM karena daya beli merupakan salah satu indikator IPM.

### **2.2.2 Hubungan Anggaran Pendidikan Dengan Indeks Pembangunan Manusia**

Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Terutama dari segi kuantitas dan kualitas, mulai dari meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sampai ke tingkat yang lebih tinggi dan semakin tinggi rata-rata kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat. Kondisi tersebut akan memudahkan setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi. Akhirnya dapat meningkatkan ekonomi dan standar hidup rakyat suatu negara.

Secara sederhana dari kedua penjelasan diatas bisa dijelaskan bahwa hubungan anggaran pendidikan terhadap IPM yaitu anggaran pendidikan yang di alokasikan oleh pemerintah pada kegiatan pendidikan di Indonesia dalam berbagai bentuk baik pembangunan infrastruktur, peningkatan sistem pendidikan, penyediaan fasilitas dan lainnya, akan membawa dampak terhadap

sumber daya manusia yang lebih berkualitas dari aspek kognitif, keterampilan dan karakter, akhirnya akan mendorong perekonomian dan kesejahteraan bangsa. Sejalan dengan yang dinyatakan pada teori *Human Development Theory* bahwa bantuan pemerintah berperan penting untuk masyarakat miskin karena setiap orang akan dapat meraih pendidikan yang layak serta hak sama memperoleh pendidikan, yang akan mendorong peningkatan kualitas SDM. Teori ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh peneliti (Anisa Fahmi & Khairul Amri Dalimunthe, 2018), (Maharda & Aulia, 2020)

### **2.2.3 Hubungan Anggaran Kesehatan Dengan Indeks Pembangunan Manusia**

Menurut Tjiptoherijanto, (Astri Meylina, 2013) kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Aspek kesehatan yang ditinjau dari kesehatan seseorang antara lain kalori, gizi, atau derajat kesehatan seseorang tersebut. Jika ketiga aspek tersebut rendah maka akan menghasilkan kualitas manusia yang rendah dan mental yang terbelakang. Hubungan antara anggaran kesehatan dengan IPM bersifat positif artinya jika anggaran kesehatan naik dalam arti jumlah dana yang dikeluarkan, maka IPM pun akan naik. Sama halnya dengan anggaran pendidikan, anggaran kesehatan selain di alokasikan pada program-program perbaikan gizi atau program lainnya yang mengedukasikan bagaimana cara hidup yang sehat, anggaran kesehatan juga harus dialokasikan pada pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas serta penyediaan obat-obatan dan alat kesehatan yang lengkap, diharapkan mampu meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.

Penjelasan tadi sesuai dengan yang dikatakan (Todaro & Smith, 2012) bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan merupakan perwujudan pemerintah untuk memberikan salah satu hak dasar yaitu memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan yang menjadi prasyarat bagi produktivitas masyarakat. Sesuai dengan teori *Human Development Theory* yaitu jika setiap penduduk memiliki jaminan kesehatan, maka kegiatan ekonomi di daerah tersebut akan terlaksana yang artinya secara langsung juga akan berpengaruh terhadap IPM. Pernyataan ini diperkuat oleh peneliti lain (Julita Senewe et al., 2021), (Sal Diba Susen Pake, 2018), (Anisa Fahmi & Khairul Amri Dalimunthe, 2018)

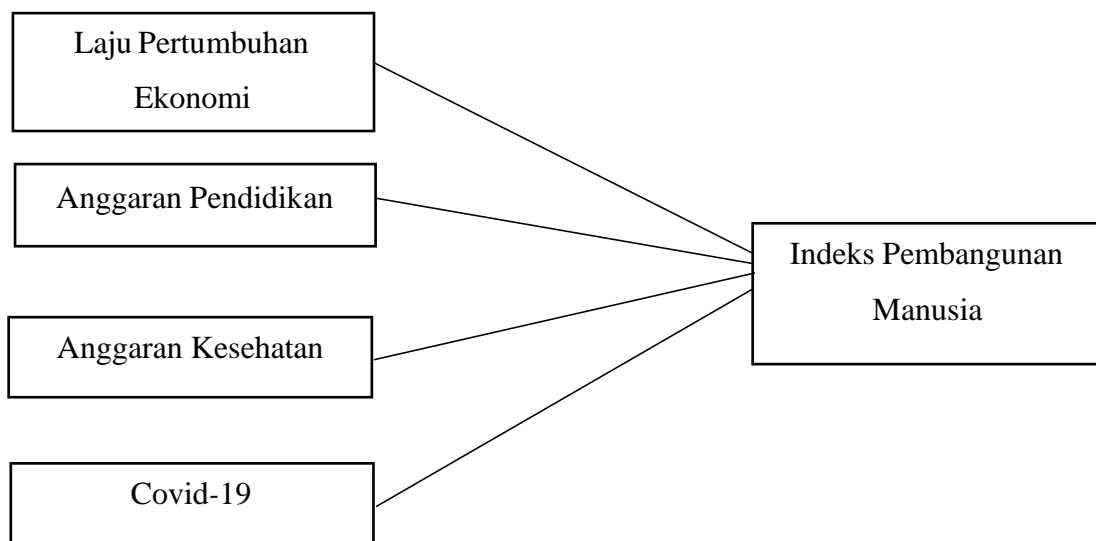
#### **2.2.4 Hubungan Covid-19 Dengan Indeks Pembangunan Manusia**

Pandemi covid-19 yang melanda seluruh negara didunia termasuk Indonesia berdampak terhadap penurunan angka IPM di Indonesia. Hal ini terjadi karena aspek-aspek kehidupan yang sebelumnya berjalan normal, menjadi terbatas yang memaksa beberapa kegiatan seperti pendidikan awalnya tatap muka menjadi virtual dengan konsep pembelajaran virtual ini dirasa proses pembelajaran juga menjadi kurang optimal, layanan konsultatif kesehatan juga banyak dilakukan secara virtual. Ditambah lagi dengan adanya beberapa sektor ekonomi yang tidak beroperasi selama pandemi seperti jasa transportasi dan pariwisata selama pandemi, akhirnya berakibat pada pendapatan masyarakat berkurang.

Perlambatan IPM pada masa pandemi covid dominannya disebabkan oleh penurunan dimensi standar hidup layak yang diwakili oleh variabel pengeluaran

per kapita riil yang disesuaikan, sedangkan dimensi umur panjang dan hidup sehat serta pengetahuan diwakili oleh variabel Angka Harapan Hidup pada kelahiran (UHH) dan Tahun Harapan Sekolah. (SLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) masih meningkat walaupun pertumbuhannya melambat (Nurfillah, S & Satiti, 2022)

Berdasarkan dari uraian diatas yang menjabarkan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Penulis membuat skema mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi, anggaran pendidikan, anggaran kesehatan dan covid-19 terhadap IPM di Indonesia sebagai berikut:



**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Setelah melakukan tinjauan pustaka dan kajian terhadap penelitian terdahulu tentang Indeks Pembangunan Manusia, maka dalam penelitian ini penulis akan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial laju pertumbuhan ekonomi, anggaran pendidikan, anggaran kesehatan berpengaruh positif, sedangkan covid-19 berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia
2. Diduga secara simultan laju pertumbuhan ekonomi, anggaran pendidikan, anggaran kesehatan dan covid-19 berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.